

Efektivitas Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Kompleksitas Instansi Dan Opini Audit Terhadap Kasus Korupsi (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Di Indonesia)

Wahyu Setio Utomo*

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan

*E-mail : wahyu.setio.utomo@unukase.ac.id

Abstract

This research examines the effect of internal control effectiveness, the role of internal audit, the level of internal audit authority, internal audit size, ministry size, agency complexity and audit opinion on corruption in ministries/agencies in Indonesia. The effectiveness of internal control is seen from the number of internal control findings and non-compliance with statutory regulations in the BPK audit report, the role of internal auditors in an agency is proxied by the maturity of the SPIP in the BPKP report, ministry size is proxied from the realization of the expenditure budget (in percentage), agency complexity is proxied by the number of work units, and audit opinion is taken from the BPK audit report. The dependent variable is corruption in ministries/agencies seen from the number of corruption cases in the KPK report with inchract status in 2018-2022. This research uses secondary data with a sample of 405 ministries/agencies in Indonesia, the analysis method used is binary logistic regression. The research results show that the role of internal audit has an effect on reducing corruption cases, the realization of the expenditure budget (in percentage) has a positive effect on the increase in corruption cases. Meanwhile, the effectiveness of internal control, number of work units and audit opinions in ministries/agencies do not affect corruption.

Keywords: Corruption; internal control; internal audit's role; the size of the ministries/agencies; the complexity of the ministries/agencies; audit opinions.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingkat kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran kementerian, kompleksitas lembaga, dan opini audit terhadap korupsi di

kementerian/lembaga di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam laporan audit BPK, peran auditor internal di suatu lembaga diwakili oleh kematangan SPIP dalam laporan BPKP, ukuran kementerian diwakili oleh realisasi anggaran belanja (dalam persentase), kompleksitas lembaga diwakili oleh jumlah unit kerja, dan opini audit diambil dari laporan audit BPK. Variabel dependen adalah korupsi di kementerian/lembaga yang dilihat dari jumlah kasus korupsi dalam laporan KPK dengan status intrakrat pada tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 405 kementerian/lembaga di Indonesia, metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap pengurangan kasus korupsi, realisasi anggaran belanja (dalam persentase) berpengaruh positif terhadap peningkatan kasus korupsi. Sementara itu, efektivitas pengendalian internal, jumlah unit kerja, dan opini audit di kementerian/lembaga tidak berpengaruh terhadap korupsi.

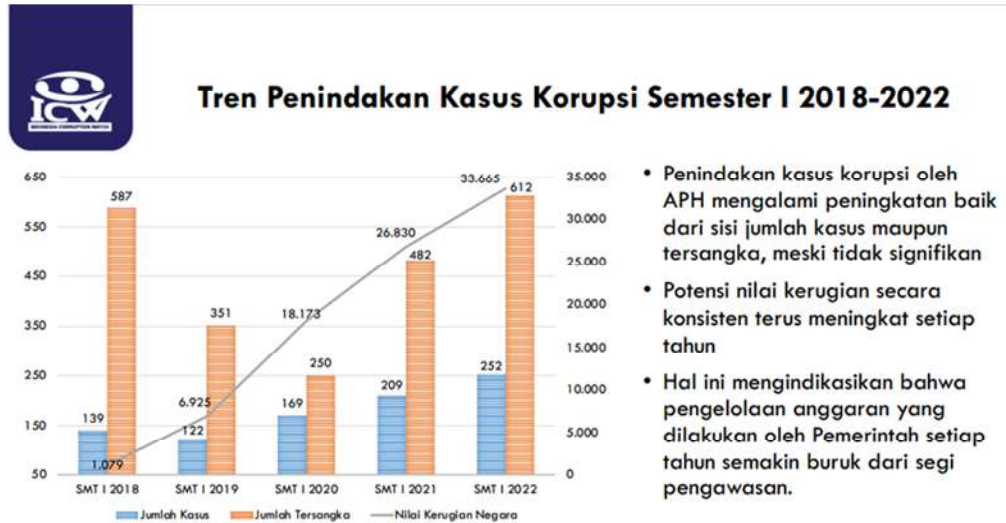
Kata kunci: Korupsi; pengendalian internal; peran audit internal; ukuran kementerian/lembaga; kompleksitas kementerian/lembaga; opini audit.

PENDAHULUAN

Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada 2022, skor ini menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di Asia Tenggara. Transparency International melakukan survei indeks korupsi di 180 negara, dimana skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup, dan skor 100 artinya sangat bersih dari korupsi dan menurut laporan tersebut, rata-rata IPK global pada 2022 sebesar 43, yang berarti indeks korupsi di Indonesia lebih buruk dari rata-rata dunia (Transparency International Indonesia, 2023).

ICW pada rentang tahun 2016-2021 menemukan bahwa sedikitnya terdapat 83 aktor korupsi dengan latar belakang pimpinan menengah di Kementerian/Lembaga. ICW juga menemukan ada 76 pegawai/karyawan di Kementerian/Lembaga terpantau merupakan aktor korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan ada 51 aktor korupsi memiliki jabatan direktur di Kementerian/Lembaga dan terakhir sedikitnya 40 aktor korupsi di lingkungan

Kementerian/Lembaga dapat diklasifikasikan memiliki latar belakang pekerjaan lainnya (Indonesian Corruption Watch, 2022).



Gambar 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018-2022

(Sumber: www.antikorupsi.org)

Mardiasmo (2006) menyebutkan ada tiga aspek yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, pemeriksaan. Ketiga aspek yang mendukung terciptanya good governance yang baik dalam penelitian ini diwakili dengan sistem pengendalian internal, peran audit internal, tingkat kewenangan audit, ukuran audit internal, ukuran kementerian/lembaga, kompleksitas kementerian/lembaga dan opini audit.

Penelitian ini merujuk dan meneliti ulang dari penelitian yang dibuat oleh Nurhasanah (2016) yang meneliti tentang efektivitas pengendalian internal yang diproksikan dengan jumlah temuan SPI dalam LHP BPK tahun 2012-2014, peran audit internal yang diproksikan dengan jumlah temuan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam LHP BPK tahun 2012-2014, tingkat kewenangan auditor yang diproksikan dengan unit pengawasan yang dipimpin eselon 1 dan 2 diambil dari LHP BPK, ukuran audit internal yang diproksikan dengan jumlah auditor internal diambil dari laporan BPKP, ukuran kementerian yang diproksikan dengan jumlah satuan kerja serta kompleksitas kementerian yang diproksikan dengan jumlah realisasi anggaran belanja yang diambil dari LHP BPK, yang

kemudian diteliti pengaruhnya terhadap kasus korupsi yang datanya diambil dari laporan KPK berstatus inkrah.

Pada penelitian ini yang menjadi pembaharuan dan menjadi pembeda adalah alat uji statistiknya menggunakan regresi logistik alasannya karena dari struktur data yang dikumpulkan dalam bentuk time series lebih cocok jika menggunakan regresi logistik; tahun data yang diambil lebih update yaitu dari tahun 2018-2022, menambahkan variabel opini audit dikarenakan terdapat data opini audit yang dikumpulkan dari LHP BPK sehingga peneliti menambahkan variabel ini untuk melihat pengaruhnya terhadap korupsi; untuk variabel efektivitas pengendalian internal menggunakan data jumlah temuan SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dari laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK sedangkan penelitian Nurhasanah (2016) hanya menggunakan jumlah temuan SPI dari LHP BPK; untuk peran audit internal menggunakan data capaian level maturitas dari laporan kinerja BPKP sedangkan Nurhasanah (2016) menggunakan jumlah temuan kepatuhan terhadap perundang-undangan; untuk ukuran K/L realisasi anggaran diukur dengan persentase (%) sedangkan Nurhasanah (2016) menggunakan nilai besaran nominal, tidak memasukkan variabel tingkat kewenangan auditor dan ukuran audit internal sebagai variabel bebas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, kemudian dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah efektivitas pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kasus korupsi di Kementerian/Lembaga?
- b. Apakah peran audit internal di Kementerian/Lembaga berpengaruh terhadap kasus korupsi di Kementerian/Lembaga?
- c. Apakah ukuran Kementerian/Lembaga berpengaruh terhadap kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga?
- d. Apakah kompleksitas instansi berpengaruh terhadap kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga?
- e. Apakah opini audit di Kementerian/Lembaga berpengaruh terhadap kasus korupsi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian internal pemerintah terhadap kasus korupsi di Kementerian/Lembaga.
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh peran audit internal di Kementerian/Lembaga terhadap kasus korupsi di kementerian/Lembaga.
- c. Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran Kementerian/Lembaga terhadap kasus korupsi di Kementerian/Lembaga.
- d. Menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas Kementerian/Lembaga terhadap kasus korupsi di Kementerian/Lembaga.
- e. Menguji dan menganalisis pengaruh opini audit di Kementerian/Lembaga terhadap kasus korupsi.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi
Sebagai referensi untuk peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga.
2. Untuk Praktisi
Untuk Kementerian/Lembaga penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus korupsi sehingga dapat digunakan sebagai suatu bentuk pengawasan oleh internal audit maupun jajaran manajemen.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Korupsi

Robert Klitgaard (2005) mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan

status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri). Definisi lainnya dari korupsi adalah tingkah laku melanggar aturan-aturan pelaksanaan yang berhubungan dengan tingkah laku pribadi dan merupakan akibat dari keberadaan monopoli (kekuasaan) diasosiasikan dengan kekuasaan besar tanpa keterbukaan dan tanggung jawab.

Teori penyebab korupsi disampaikan oleh peneliti Donald R Cressey yang dikenal sebagai Teori Fraud Triangle (TFT) pada tahun 1950, dalam teori tersebut, ada tiga tahapan penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi), seseorang memiliki motivasi untuk korupsi karena tekanan, misalnya motif ekonomi yang menjadi pelatuknya, namun menurut Cressey tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada, seseorang cukup berpikir bahwa dia tertekan atau tergoda pada bayangan insentif, maka pelatuk pertama ini telah terpenuhi, kedua adalah kesempatan, contoh yang paling mudah ditemui adalah lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan untuk korupsi, menurut Cressey, jika dia tidak melihat adanya kesempatan maka korupsi tidak bisa dilakukan, ketiga adalah rasionalisasi. Cressey menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi, rasionalisasi ini setidaknya menipiskan rasa bersalah pelaku, contohnya "saya korupsi karena tidak digaji dengan layak" atau "keuntungan perusahaan sangat besar dan tidak dibagi dengan adil" (Cressey, 1950).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pengendalian Internal Pemerintah adalah seluruh proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal dikatakan optimal jika aktivitas Kementerian/lembaga telah sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam pengendalian internal yaitu adanya struktur organisasi, sistem wewenang dan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Perundang-undangan, 2008).

Efektivitas Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang optimal akan memberikan keyakinan bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi, risiko yang mungkin akan terjadi dapat di

prediksi dan teratasi, informasi mengenai laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini akan mempersempit untuk terjadinya tindak pidana korupsi (B.P.K.P., 2017). Pengendalian internal yang efektif dapat sangat mempengaruhi tingkat korupsi di sebuah kementerian, hal ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem pengendalian yang baik dan audit yang tepat guna untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset publik.

Pengendalian internal yang baik dapat dibuktikan dengan jumlah temuan audit, yang dalam penelitian ini akan diproksikan dengan temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dari LHP BPK. Semakin sedikit temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan maka risiko terjadinya kasus korupsi semakin kecil namun semakin banyak temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan maka semakin tinggi risiko terjadinya kasus korupsi.

Peran Audit Internal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa peran audit internal (BPKP) adalah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, dengan melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan. Internal auditor dapat dikatakan berperan secara optimal jika sesuai dengan fungsinya yaitu mencegah terjadinya kecurangan dan dapat mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang akan timbul (Amrizal, 2004).

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan, namun pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul (Amrizal, 2004), peran ini dapat diproksikan dengan tinggi dan rendahnya nilai level maturitas SPIP. Sehingga semakin tinggi nilai maturitas spip yang artinya semakin baik peran auditor internal dalam mendeteksi kecurangan, maka akan dapat menurunkan kasus

korupsi pada kementerian/lembaga, namun sebaliknya, semakin banyak jumlah temuan maturitas sip yang artinya semakin kurang efektif peran audit internal dalam mendeteksi kecurangan, maka akan menaikkan kasus korupsi pada kementerian/lembaga.

Ukuran Kementerian/Lembaga

Menurut Duho (2021) menyebutkan ukuran kementerian/lembaga adalah suatu nilai yang dapat menggambarkan besar kecilnya Kementerian/Lembaga dengan beberapa kriteria pengukuran yaitu nilai aset keseluruhan, jumlah satuan kerja, total aset, total pendapatan, belanja dan produktivitas yang semuanya berfungsi sebagai indikator ukuran. APBN dan APBD di Indonesia masih dinilai kurang pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakefisienan anggaran, berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) dan kebocoran yang terjadi pada sisi pengeluaran terjadi karena adanya pengeluaran anggaran yang lebih besar dari jumlah seharusnya.

Penggunaan anggaran yang tidak efisien salah satunya diakibatkan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga berisiko mengakibatkan terjadinya kasus korupsi. Semakin besar ukuran kementerian/lembaga yang diprosikan dengan persentase realisasi anggaran belanja maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kasus korupsi, namun semakin kecil persentase realisasi anggaran belanja maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kasus korupsi.

Kompleksitas Instansi

Menurut PMK NOMOR 119/PMK.05/2007 Pasal 1, satuan kerja instansi pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang. Pada pasal 2 dan 3 disebutkan satuan kerja sebagai pengelola keuangan diharuskan membuat laporan keuangan pokok yang salah satunya terdiri atas laporan realisasi anggaran dan bersedia diaudit secara independen, hal ini dilakukan untuk mengawasi satuan kerja sebagai pengguna anggaran agar tidak melakukan penyelewengan atau korupsi dalam penggunaan anggaran.

Satuan kerja memiliki peran krusial dalam mempengaruhi tingkat korupsi, penerapan prinsip-prinsip good governance, perencanaan yang baik, pemisahan

tugas yang jelas, pengawasan yang efektif, serta budaya organisasi yang menghargai integritas dan transparansi akan membantu mengurangi risiko terjadinya kasus korupsi di Kementerian/Lembaga. Sehingga semakin banyak jumlah satuan kerja maka akan semakin tinggi kasus korupsi di kementerian/lembaga, namun sebaliknya akan semakin sedikit jumlah satuan kerja maka semakin rendah kasus korupsi.

Opini Audit

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020, opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) (BPK RI, 2020). Opini auditor merupakan hasil dari audit laporan keuangan yang memberikan informasi kepada auditee apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

Opini audit juga sebagai indikasi apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan peraturan dan data-data yang sesuai, hal ini dapat dijadikan salah satu indikator apakah terjadi kecurangan, kesengajaan dan perbuatan yang melanggar peraturan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengarah pada fraud ataupun korupsi. Terdapat empat opini audit yang diberikan oleh BPK yaitu opini WTP berarti laporan keuangan yang disajikan wajar, opini WDP berarti laporan keuangan disajikan wajar namun dengan pengecualian, opini TW berarti laporan yang disajikan tidak wajar dan terakhir opini TMP berarti auditor tidak memberikan opini.

Opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan dan deteksi kasus korupsi, opini audit yang baik tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, tetapi juga dapat memperkuat kontrol internal dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi terjadinya kasus korupsi. Sehingga diharapkan semakin bagus opini audit yang diprosikan dengan status WTP maka semakin sedikit kasus korupsi, namun sebaliknya semakin tidak bagus opini audit

yang diprosikan dengan status opini diluar WTP maka semakin banyak kasus korupsi.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H1. Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia.
- H2. Peran Audit Internal di Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia.
- H3. Ukuran Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.
- H4. Kompleksitas Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.
- H5. Opini Audit di Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif kausal, dengan menggunakan data sekunder, menurut (Sugiyono, 2015), pendekatan kuantitatif kausal merupakan pendekatan dalam penelitian yang mencari hubungan antar satu variabel dengan variabel lain yang memiliki sebab akibat. Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan dan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kementerian dan Lembaga di Indonesia yang memiliki karakteristik jumlah anggaran dan laporan keuangannya selama lima tahun berturut-turut (2018-2022) di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dengan total 448 populasi, dengan rincian populasi sebagai berikut : di tahun 2018 sebanyak 91 K/L, di tahun 2019 sebanyak 89 K/L, di tahun 2020 sebanyak 89 K/L, di tahun 2021 sebanyak 90 K/L dan di tahun 2022 sebanyak 89 K/L.

Sampel data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 405 sampel dari jumlah populasi data 81 Kementerian dan Lembaga yang posisi

laporan keuangannya di audit oleh BPK selama 5 tahun berturut-turut yaitu pada periode 2018 – 2022.

Tabel 1. Sampel dalam Penelitian

KETERANGAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bagian Anggaran K/L diaudit BPK	91	89	89	90	89
Jumlah Bagian Anggaran K/L tidak diaudit BPK	10	8	8	9	8
Jumlah sampel akhir 81 (Anggaran K/L diaudit BPK) x 5 tahun = 405	81	81	81	81	81

Sumber : diolah oleh peneliti

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen – Korupsi

Definisi Operasional korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan yang berhubungan dengan tingkah laku pribadi dan merupakan akibat dari keberadaan monopoli (kekuasaan) diasosiasikan dengan kekuasaan besar tanpa keterbukaan dan tanggung jawab (Klitgaard, 2005).

2. Variabel Independen - Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal pemerintah adalah seluruh proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan kekayaan negara dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

3. Variabel Independen - Peran Auditor Internal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Peran Audit Internal (BPKP) adalah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, dengan melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan.

4. Variabel Independen – Ukuran Kementerian dan Lembaga

Menurut (Duho, 2021) menyebutkan ukuran kementerian/lembaga adalah suatu nilai yang dapat menggambarkan besar kecilnya Kementerian/Lembaga dengan beberapa kriteria pengukuran yaitu nilai aset keseluruhan, jumlah satuan kerja, total aset, total pendapatan, belanja dan produktivitas yang semuanya berfungsi sebagai indikator ukuran Kementerian/Lembaga.

5. Variabel Independen – Kompleksitas Kementerian dan Lembaga

Kompleksitas Kementerian/Lembaga adalah tingkat pembagian atau diferensiasi dalam organisasi yang memuat di dalamnya spesialisasi, pembagian kerja, tingkatan hierarki organisasi dan penyebaran unit organisasi secara geografis, peningkatan salah satu dari jenis diferensiasi ini secara otomatis akan menambah kompleksitas struktur sebuah organisasi (Kusdi, 2011 : 168).

6. Variabel Independen – Opini Audit

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk menggambarkan masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi, sebagai berikut :

1. Variabel Y – korupsi, diambil dari data laporan tindak pidana korupsi yang berstatus inkracht pada rentang periode tahun 2018-2022, yang diterbitkan

dalam website resmi KPK, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/inkracht>.

2. Variabel X1 – efektivitas pengendalian internal, diambil dari data temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan Kementerian dan Lembaga, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester BPK pada rentang periode tahun 2018-2022, yang diterbitkan dalam website resmi BPK, <https://www.bpk.go.id/ihips>.
3. Variabel X2 – peran audit internal, data diambil dari laporan kinerja BPKP dengan mengambil data capaian level maturitas SPIP Kementerian dan Lembaga Indonesia, dalam rentang periode tahun 2018-2022, yang diterbitkan dalam website resmi BPKP, <https://www.bpkp.go.id/konten/3863/Laporan-Kinerja-BPKP.bkp>.
4. Variabel X5 – ukuran kementerian dan lembaga, data diambil dari realisasi anggaran pengeluaran Kementerian dan Lembaga dalam rentang periode tahun 2018-2022, dengan mengambil data dari laporan hasil pemeriksaan BPK, yang diterbitkan dalam website resmi BPK, https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan.
5. Variabel X6 – kompleksitas Kementerian dan Lembaga, data diambil dari jumlah satuan kerja Kementerian/Lembaga dari LHP BPK.
6. Variabel X7 – opini audit, data diambil dari laporan keuangan masing-masing Kementerian dan Lembaga, dari laporan hasil pemeriksaan BPK, yang diterbitkan dalam website resmi BPK, https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan dan diperkuat dengan data dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester BPK, yang diterbitkan dalam website <https://www.bpk.go.id/ihips>, dalam rentang periode tahun 2018-2022.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi logistik biner (regression logistic *biner*), penelitian ini menggunakan metode *enter*, artinya semua variabel dimasukkan ke dalam model meskipun tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan tertentu, analisis inferensia dilakukan dengan menggunakan paket program SPSS 23.0 *for windows*.

Bentuk umum model regresi logistik dengan p variabel penjelas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right) = \beta_0 + \beta_1 SP + \beta_2 IA + \beta_5 UK + \beta_6 KI + \beta_7 OA$$

Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini :

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2log *likelihood*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai -2LL awal dengan -2LL pada langkah berikutnya. Jika nilai -2LL block number = 0 lebih besar dari nilai -2LL blok number = 1, maka penurunan (-2LogL) menunjukkan bahwa model regresi yang lebih baik (Ghozali, 2016 : 328).

Menguji Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test)

Uji kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer dan Lemeshow's yang diukur dengan nilai chi square. Model ini untuk menguji hipotesis nol bahwa apakah data empiris sesuai dengan model yaitu tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit (Ghozali, 2016 : 329).

Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Koefisien determinasi pada regresi logistik dilihat dari Nagelkerke R Square, karena nilai Nagelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai *R Square* pada *multiple regression*, modifikasi dari *koefisien cox and snell* untuk memastikan bahwa nilai akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu), (Ghozali, 2016 : 329).

Matriks Klasifikasi

Menurut (Ghozali, 2016 : 321), tabel klasifikasi 2 x 2 digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah (incorrect).

Uji Omnibus Tests of Model Coefficients (Uji Simultan F)

Omnibus tests of model coefficient merupakan uji statistik secara simultan (uji F). Dalam penelitian ini akan menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016 : 96).

Uji Parsial t (Uji Wald)

Menurut (Ghozali, 2016 : 97) uji wald (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan

variabel dependen. Untuk mengetahui nilai uji wald (uji t), tingkat signifikansi sebesar 5%.

HASIL PENELITIAN

Goodness of Fit

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

H0 : Model fit (tidak terdapat perbedaan hasil antara observasi dan hasil prediksi dari model)

H1 : Model tidak fit (terdapat perbedaan hasil antara observasi dan hasil prediksi dari model)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,144. Nilai signifikansi ini berada di atas atau lebih besar dari α yang digunakan, yaitu sebesar 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah sesuai/fit dengan data yang digunakan sehingga dapat dilakukan pengujian parameter.

Tabel 2. Nilai *Chi Square* hitung Uji Kelayakan *Hosmer and Lemeshow*

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	12.172	8	.144

Sumber : Pengolahan data SPSS, 2024

Tabel Klasifikasi

Dari tabel di bawah ini, diketahui bahwa nilai overall percentage adalah sebesar 82,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan mempunyai kesesuaian/kemampuan dalam memprediksi jumlah kasus korupsi di kementerian dan lembaga dengan baik, yaitu sebesar 82,7%.

Tabel 3. Tabel Klasifikasi

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		Kasus Korupsi		Percentage
		,00	1,00	Correct

Step 1	Kasus Korupsi .00	331	3	99.1
	1.00	67	4	5.6
	<i>Overall Percentage</i>			82.7

a. *The cut value is ,500*

Sumber : Pengolahan data SPSS, 2024

Uji F

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai statistik uji G yang mengikuti distribusi *Chi Square* sebesar 33,187 dengan p-value 0,000 pada step terakhirnya. Nilai dari statistik tersebut kemudian dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ yang menghasilkan kesimpulan tolak H_0 karena p-value memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai α sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata variabel dapat menjelaskan terjadinya kasus korupsi di lingkungan Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Tabel 4. Nilai statistik hitung *Chi Square Omnibus Test of Model Coefficient* dan signifikansi model

Omnibus Tests of Model Coefficients

		<i>Chi-square</i>	df	Sig.
<i>Step 1</i>	<i>Step</i>	33.187	7	,000
	<i>Block</i>	33.187	7	,000
	<i>Model</i>	33.187	7	,000

Sumber : Pengolahan data SPSS, 2024

Uji T

Tabel 5. di bawah merupakan tabel yang menyajikan nilai statistik wald yang dapat digunakan untuk menentukan signifikansi variabel secara parsial. Dalam tabel di atas, misalkan, diketahui bahwa nilai dari variabel SP (efektivitas pengendalian internal, IA (peran audit internal), RA (ukuran K/L) dan KO (kompleksitas K/L) masing-masing berurutan adalah sebesar 5.784, 32,314, 20,493 dan 12.730 yang jika dibandingkan dengan nilai $\chi^2 (0.05,1)$, yaitu sebesar 3,841 nilainya lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas

pengendalian internal, peran audit internal, ukuran dan kompleksitas Kementerian/Lembaga memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dengan kecenderungan terjadinya kasus korupsi Kementerian Lembaga di Indonesia tahun 2018-2022.

Tabel 5. Hasil Uji T *Variables in the Equation*

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Ket
Step 1 ^a	SP(1)	.1,201	.790	5.784	1	.000**	3.323	Diterima
	IA(1)	2,807	,511	32,314	1	,000**	16,560	Diterima
	RA	,417	,069	20,493	1	,000**	1,517	Diterima
	KO	.001	.000	12.730	1	.000**	1.001	Diterima
	OA(1)	-1.020	1.059	.928	1	.335	.361	Ditolak
	Constant	-2.275	1.210	3.532	1	.050**	.103	

Sumber : Pengolahan data SPSS, 2024

Keterangan: Uji statistik Wald dibandingkan dengan $\chi^2(0,05,1)=3,481$ atau $\chi^2(0,10,1)=2,705$

Interpretasi Odd Ratio (Kecenderungan)

Hasil regresi logistik biner diketahui bahwa variabel-variabel penjelas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y adalah variabel SP, IA, RA, dan KO pada taraf signifikansi atau $\alpha=0,05$ (5%) sedangkan variabel lain tidak bernilai signifikan secara statistik.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Jumlah Kasus Korupsi

Hipotesis 1 menyatakan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kasus korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 1 diterima. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana β memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat

signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 1,201. Semakin sedikit temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan maka risiko terjadinya kasus korupsi semakin kecil namun semakin banyak temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan maka semakin tinggi risiko terjadinya kasus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, (2016), Marciano et al., (2021), Firmansyah, (2020), Omar M & Al-Hawatmeh, (2016), Nahartyo & Haryono, (2018), Morehead, (2007), Apriastanti & Widajantie, (2022), Apriani, (2020), Layuk, (2019), Saleh & Ratmono, (2017), Umar et al., (2021), Shu et al., (2015), Utami, (2020). Dimana efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kasus korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia.

2. Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Jumlah Kasus Korupsi

Hipotesis 2 menyatakan Peran Audit Internal di Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 2 diterima. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana β memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 2,807. Sehingga semakin tinggi nilai maturitas sip yang artinya semakin baik peran auditor internal dalam mendeteksi kecurangan, maka akan dapat menurunkan kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga, namun sebaliknya, semakin banyak jumlah temuan maturitas sip yang artinya semakin kurang efektif peran audit internal dalam mendeteksi kecurangan, maka akan menaikkan kasus korupsi pada Kementerian/Lembaga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, (2020), Saleh & Ratmono, (2017), Layuk, (2019), Umar et al., (2021), Nahartyo & Haryono, (2018), Shu et al., (2015), Morehead, (2007), Apriastanti & Widajantie, (2022), Apriani, (2020). Dimana peran audit internal di Kementerian/Lembaga berpengaruh positif terhadap kasus korupsi.

3. Pengaruh Ukuran Kementerian/Lembaga Terhadap Jumlah Kasus Korupsi

Hipotesis 3 menyatakan Ukuran Kementerian/Lembaga Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 3 diterima. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana β memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,417.

Penggunaan anggaran yang tidak efisien salah satunya diakibatkan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga berisiko mengakibatkan terjadinya kasus korupsi. Semakin besar ukuran Kementerian/Lembaga yang diprosikan dengan persentase realisasi anggaran belanja maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kasus korupsi, namun semakin kecil persentase realisasi anggaran belanja maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kasus korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhasanah, (2016), Arsandi, (2022), Windarti, (2015), Wicaksono & Prabowo, (2022), Ali & Isse, (2003), Fisman & Gatti, (2002); dengan hasil tidak signifikan : Saleh & Ratmono, (2017). Dimana ukuran Kementerian/Lembaga berpengaruh positif terhadap kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

4. Pengaruh Kompleksitas K/L Terhadap Jumlah Kasus Korupsi

Hipotesis 4 menyatakan kompleksitas K/L berpengaruh positif terhadap kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 4 diterima. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana β memiliki tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,001.

Satuan kerja memiliki peran krusial dalam mempengaruhi tingkat korupsi, penerapan prinsip-prinsip good governance, perencanaan yang baik, pemisahan tugas yang jelas, pengawasan yang efektif, serta budaya organisasi yang menghargai integritas dan transparansi akan membantu mengurangi risiko terjadinya kasus korupsi di Kementerian/Lembaga. Sehingga semakin banyak jumlah satuan kerja maka akan semakin tinggi kasus korupsi di Kementerian/Lembaga, namun sebaliknya akan semakin sedikit jumlah satuan kerja maka semakin rendah kasus korupsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Liu & Lin, (2012), Khasanah & Rahardjo, (2014), Indriastuti & Ifada, (2011), Christi Novita Lorensa et al.,

(2018), Amrih et al., (2018), Batul & Ngumar, (2019), Nurhasanah, (2016), Aziz, (2017), Nugrahaeni et al., (2019), Aini, (2017). Dimana kompleksitas K/L berpengaruh positif terhadap kasus korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

5. Pengaruh Opini Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi

Hipotesis 5 menyatakan Opini Audit Berpengaruh Positif Terhadap Kasus Korupsi pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia, hasil pengujian menunjukkan hipotesis 5 ditolak. Hal ini didukung dengan bukti empiris dimana β memiliki tingkat signifikansi = 0,335 lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien beta sebesar -1,020.

Opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi dapat diuraikan bahwa opini audit adalah pendapat profesional yang diberikan oleh auditor independen setelah mengevaluasi kewajaran laporan keuangan suatu entitas, opini ini tidak secara langsung terkait dengan penilaian atas potensi kasus korupsi di dalam organisasi tersebut. Opini audit lebih berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan kewajaran laporan keuangan, auditor akan menilai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan apakah ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2020), dimana opini audit tidak berpengaruh terhadap kasus korupsi. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh : Layuk, (2019), Wicaksono & Prabowo, (2022), Rini, (2014), Syahrir & Elly Suryani., (2020), Afif, (2017), Utomo W. P., (2018), Utami, (2020), Saleh & Ratmono, (2017), Heriningsih, (2013), Husna et al., (2017), Pertiwi & Haryanto., (2022), Pandji & Utomo, (2023), Ningsih & Haryanto., (2022), dimana opini audit berpengaruh terhadap kasus korupsi.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan membuktikan ada pengaruh yang signifikan untuk efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, ukuran Kementerian

/Lembaga dan kompleksitas instansi terhadap jumlah kasus korupsi di Kementerian/Lembaga Indonesia.

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan ada pengaruh yang signifikan untuk tingkat kewenangan auditor, ukuran audit internal dan opini audit terhadap jumlah kasus korupsi di Kementerian/Lembaga Indonesia.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data referensi jumlah kasus korupsi yang diambil dari Laporan KPK berstatus Inkrah pada penelitian ini masih kurang cukup karena keterbatasan dalam mencari data jumlah kasus korupsi, dimana masih ada penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menghadapi kendala untuk mendapatkan data kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penelitian ini tidak bisa menggunakan data tahun 2023 karena Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih belum dipublikasikan pada saat penelitian ini dilakukan.
3. Tidak bisa membuktikan data pada penelitian dengan lebih terperinci, karena keterbatasan referensi data yang didapatkan pada penelitian ini.

SARAN UNTUK PENELITIAN SELANJUTNYA

Saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Mendapatkan data kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk data referensi jumlah kasus korupsi yang lebih lengkap.
2. Mengambil data dari laporan BPK tahun periode 2023 dan 2024.
3. Mencari referensi data yang lebih terperinci untuk menggambarkan masing-masing variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. F. (2017). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember. Universitas Muhammadiyah.
- Aini, F. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kompleksitas Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia periode 2011-2012). Jurnal Online Mahasiswa, 4(1).
- Ali, A. M. , & Isse, H. S. (2003). *Determinants Of Economic Corruption : A Cross-Country Comparison*. Canto Jurnal 22.
- Amrih, Muh. , Haming, Murdifin. , & Junaid, Asriani. (2018). Pengaruh Keahlian Audit, Self Efficacy, Dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dimediasi Oleh Audit Judgment (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). Akmen Jurnal Ilmiah, 15(4).
- Amrizal. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian kecurangan oleh internal auditor. Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputi Bidang Investigasi.
- Apriani, Ulfah. (2020). Pengaruh Komponen-Komponen Fraud Star Terhadap Korupsi Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Mahkamah Agung RI. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti.
- Apriastanti, S., & Widajantie, T. (2022). Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. JIMAT (JuIlmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha.
- Arsandi, S. Aditiya. (2022). The grease of the wheel di Indonesia: Pengaruh korupsi terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah. Jurnal Antikorupsi.
- Aziz, I. (2017). Pengaruh Kompleksitas Auditor, Profesionalisme Auditor, Dan *Whistleblower* Terhadap Kemampuan Auditor Forensik Dalam Pembuktian Kecurangan. UIN Syarif Hidayatullah.

- Batul, F. Hersi. , & Ngumar, Sutjipto. (2019). Pengaruh Independensi, Pengalaman Dan Kompleksitas Tugas Auditor Terhadap Pendektesian Kecurangan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 8(1).
- BPK RI. (2020, July 13). *Ragam Opini BPK*. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>.
- B.P.K.P. (2017). *Peraturan BPKP Nomor 8 Tentang Piagam Pengawasan Intern*.
- Christi Novita Lorensa, ., Syaikhul Fallah, ., & Mariolin A. Sanggenafa. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Komponen Struktur Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* , 13(2), 13–25.
- Cressey, D. R. (1950). *Fraud Triangle Theory*.
- Duho, K. A.-B. (2021). *Anti-Corruption Disclosure as A Necessary Evil: Impact on. Journal of Financial*.
- Firmansyah, I. (2020). Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Di Pt Perkebunan Nusantara Viii. *Journal LAND*, N, 2715–9590.
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). *Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries. Journal Of Public Economics*.
- Heriningsih, S. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi*, 11(1), 1–86.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies. New Heaven. Yale University Press*.
- Husna, N. , Rahayu, S. , & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016). 4(2), 1637–1642.

- Indonesian Corruption Watch. (2022, March 21). Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial.
<https://Antikorupsi.Org/Id/Kasus-Korupsi-Di-Lingkungan-Bumn-Marak-Dan-Rawan-Pada-Sektor-Finansial>.
- Indriastuti, ., & Ifada. (2011). Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud. *EKOBIS* , 12(2), 168–176.
- Khasanah, N. L. , & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 864–874.
- Klitgaard, R. (2005). Membasmi Korupsi. Yayasan Obor Indonesia.
- Layuk, V. J. (2019). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Di Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). *Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data*. *China Journal of Accounting Research*, 5, 163–186.
- Marciano, B., Syam, A. S., & Nurmala. (2021). Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan: Sebuah Literatur Review. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi)*.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Morehead, W. A. (2007). *Internal Control And Governance In Non-Governmental Organizations Designed To Provide Accountability And Deter, Prevent And Detect Fraud And Corruption*.
- Nahartyo, E., & Haryono. (2018). *Magnitude Of Corruption, Rationalization, And Internal Control Quality: An Experimental Study On Subsequent Offense*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.

- Ningsih, S. T. S. , & Haryanto. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4).
- Nugrahaeni, S., Samin, S., & Nopiyanti, A. (2019). Pengaruh Skeptisisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi Dan Kompleksitas Audit Terhadap Kualitas Audit. *Equity*, 21(2), 181–198. <https://doi.org/10.34209/equ.v21i2.643>
- Nurhasanah. (2016). Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi Dan Kasus Korupsi (Studi Empiris Di Kementerian/ Lembaga. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, N, 2460–3937.
- Omar M, ., & Al-Hawatmeh, Z. M. (2016). *Evaluation of Internal Control Units for the. European Scientific Journal*, 1857– 7431.
- Pandji, Imam. , & Utomo, D. Cahyo. (2023). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *Fakultas Ekonomika & Bisnis Digital Library Universitas Dipenogoro*.
- Peraturan Perundang-undangan. (2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No 60. Sekretariat Negara.
- Pertiwi, A. Rahmah. , & Haryanto. (2022). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Di Jawa Tengah.
- Rini, A. S. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta kaitannya dengan Korupsi di Indonesia.
- Rinjani. (2022). Peran Auditor Internal Dan Auditor Eksternal Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*; ISSN, 2775 – 8907.
- Saleh, L. O. I. Hafidz., & Ratmono, D. (2017). Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit. *Diponegoro Journal Of Accounting*.

- Shah, A. (2007). *A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfer. In Intergovernmental Fiscal Transfer; Principles and Practice. The World Bank.*
- Shu, W., Wang, Z., Zhao, C., & Zheng, Y. (n.d.). *Internal Control Environment and Corruption: Evidence from Chinese State-owned Enterprises.*
- Syahrir, R. Safira. , & Elly Suryani. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017).¹ . *Journal Accounting and Finance* , 4(1), 20–28.
- Teguh, D., & Bahtiar, D. (2021). *The Effect of Rural Fund Management Accountability and Internal Control to Prevent Corruption. Jurnal Bisnis : Teori Dan Implementasi.*
- Transparency International Indonesia. (2023, January 31). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. <https://ti.or.id/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-2022-Mengalami-Penurunan-Terburuk-Sepanjang-Sejarah-Reformasi/>.
- Umar, H., Apriani, U., & Purba, Rahima. (2021). *The Roles of the Government Internal Control System to Minimize. International Journal of Financial*
- Utami, F. L. (2020). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan.*
- Utomo W. P., D. Nur. , Afifudin. (2018). Pengaruh Opini Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada 97 Kemeterian/Lembaga di Indonesia). *E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang* , 7.
- Wicaksono, G., & Prabowo, T. (2022). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle.*
- Windarti, A. (2015). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i; ISSN, 2356–1459 – 333.*